

AKTIVITAS PENGELOLAAN PANGAN LOKAL MASYARAKAT PAPUA DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN

Addina Zaharah¹, Fauziah Hafifah Hasanah², Sonia Julita³, Adhi Munajar⁴

^{1,2,3,4} UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Addinazaharah4@gmail.com¹, fauziahhafifah97@gmail.com², soniajulita429@gmail.com³, adhi.munajar@uin-suska.ac.id⁴

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article History

Published: 29 Aug 2026

Keywords:

Local Food, Sustainable Food Security, PRISMA Protocol, Customary Collaborative Food Security, Papua.



© Author(s) 2026
This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Kajian ini dilakukan untuk menyusun strategi konseptual yang efektif dalam menyokong ketahanan pangan berkelanjutan di tanah Papua dengan mengintegrasikan berbagai praktik pengelolaan pangan lokal. Menggunakan metode tinjauan pustaka sistematis (SLR) yang berbasis panduan PRISMA, pelacakan literatur dijalankan via Google Scholar untuk artikel berkisar tahun 2009–2026. Dari proses penyaringan ketat, 15 artikel ilmiah dipilih untuk dianalisis lebih mendalam lewat metode tematik. Temuan studi mengidentifikasi sejumlah kendala mendasar, mulai dari aspek konseptual, implementasi kebijakan, realitas lapangan, hingga keterbatasan teknologi yang berdampak pada tingginya post-harvest losses dan dominasi konsumsi beras impor. Guna menjawab tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model customary collaborative food security. Gagasan ini mengombinasikan tiga pilar utama: formalisasi kearifan lokal ke dalam sistem administrasi publik, pengembangan hilirisasi teknologi pascapanen berbasis wirausaha sosial, serta restorasi hak kelola masyarakat adat terhadap ekosistemnya.

This study aims to summarize, analyze, and synthesize integratively the local food management activities of Papuan communities in order to formulate effective conceptual strategies for supporting sustainable food security. The research employed a Systematic Literature Review (SLR) approach using the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) protocol. Data were collected through a literature search in the Google Scholar database using a structured combination of keywords for articles published within the 2009–2026 timeframe, resulting in 15 selected scientific articles for analysis through thematic analysis techniques. The findings reveal several conceptual, policy, empirical, and technological gaps in food management in Papua, including high post-harvest losses and dependence on imported rice. As a novel contribution, this study proposes an integrative solution in the form of a customary collaborative food security model. This model integrates the institutionalization of local wisdom into public administration, the downstream development of post-harvest technologies through sociopreneurship-based approaches, and the restoration of customary ecosystem management rights. The proposed model is expected to strengthen the role of local food systems in achieving sustainable food security in Papua.

PENDAHULUAN

Menurut Amelia dan Prasetyo¹ serta La Oge, indikator ketahanan pangan berkelanjutan dalam skala global kini telah beralih dari sekadar kuantitas produksi nasional menuju tata kelola aksesibilitas, stabilitas, dan pemanfaatan pangan di tingkat lokal dan komunitas adat. Kerentanan terhadap gejolak eksternal, kerusakan iklim, dan besarnya kehilangan hasil pascapanen (20–30%) menjadi tantangan makro dalam menjaga kontinuitas pasokan.² Guna menyukseskan target SDGs, ketergantungan pada pasokan luar harus ditekan melalui optimalisasi potensi daerah.³ Meski demikian, literatur saat ini masih menyisakan gap konseptual mengenai strategi mengonversi pola pertanian subsisten menjadi sistem pangan mandiri yang tangguh menghadapi perubahan iklim.⁴

Karakteristik sosial-ekologis yang unik serta kekayaan hayati yang melimpah menjadi modal dasar bagi Provinsi Papua. Kedaulatan pangan tradisional telah lama dipraktikkan oleh komunitas adat seperti Suku Asmat melalui budidaya tanaman pangan lokal seperti keladi, sagu, ubi jalar, gembili, talas, dan jawawut.⁵ Berbeda dengan pertanian modern yang sarat bahan kimia, masyarakat lokal menerapkan sistem agroforestri organik yang ramah lingkungan.⁶ Kontradiksinya, tingginya ketergantungan wilayah terhadap pasokan beras luar daerah menjadi potret kesenjangan empiris, mengingat sagu yang melimpah belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai alternatif pangan pokok.⁷

Dari perspektif tata kelola, policy gap menjadi pemicu utama tidak optimalnya ketahanan pangan di wilayah strategis seperti Merauke, akibat lemahnya kapasitas birokrasi dan ketidakselarasan regulasi pusat-daerah.⁸ Pengintegrasian sistem pangan adat ke dalam kebijakan administrasi publik daerah sejauh ini masih terabaikan.⁹ Kebijakan "padiisasi" yang dipaksakan oleh pemerintah daerah

¹ V. Amelia dan D. Prasetyo, "Pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat sebagai penguatan ketahanan pangan," *Jurnal Tata Kelola Perdesaan* 4, no. 2 (2022): 112–25.

² R. Siringoringo dkk., "Tantangan dan strategi penguatan ketahanan sosial berbasis kearifan lokal pada komunitas adat terpencil Suku Asmat," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Adat* 12, no. 1 (2023): 22–38; La Oge, "Pengembangan teknologi pascapanen berbasis kearifan lokal dalam mendukung ketahanan pangan," *Jurnal Ketahanan Pangan Indonesia* 6, no. 1 (2022): 33–47.

³ T. Tapi dkk., "Langkah antisipatif membangun kemandirian pangan lokal masyarakat di Papua Barat selama masa pandemi Covid-19," *Jurnal Resiliensi Ekonomi Daerah* 6, no. 2 (2023): 80–95.

⁴ Siringoringo dkk., "Tantangan dan strategi penguatan ketahanan sosial berbasis kearifan lokal pada komunitas adat terpencil Suku Asmat."

⁵ Siringoringo dkk., "Tantangan dan strategi penguatan ketahanan sosial berbasis kearifan lokal pada komunitas adat terpencil Suku Asmat"; A. W. Rauf dan M. S. Lestari, "Pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif di Papua," *Jurnal Litbang Pertanian* 28, no. 3 (2009): 97–103.

⁶ R. Indahyani dan La Maga, "Alternatif kebijakan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua," *Jurnal Pembangunan Hijau* 8, no. 3 (2023): 201–15.

⁷ A. Faisol dkk., "Analisis potensi tanaman sagu (*Metroxylon* sp) sebagai bahan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat," *Jurnal Agribisnis Kepulauan* 13, no. 1 (2025): 45–58.

⁸ I. A. Nathan, "Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan: Sinergi kebijakan dan administrasi publik di Merauke," *Jurnal Kebijakan Publik Pemerintahan* 10, no. 2 (2025): 145–60.

⁹ Nathan, "Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan: Sinergi kebijakan dan administrasi publik di Merauke"; W. Kabuam, "Tata kelola ketahanan pangan daerah perbatasan: Sinergi pemerintah dan komunitas lokal di Merauke," *Jurnal Administrasi Publik Regional* 11, no. 1 (2026): 14–29.

memicu peminggiran struktural terhadap sistem pangan berbasis umbi-umbian dan sagu.¹⁰ Akibat pendekatan yang bersifat top-down dan mengabaikan lembaga adat ini, standardisasi pangan menjadi bias beras.¹¹ Fenomena inilah yang melandasi pentingnya reformasi kebijakan guna mendukung implementasi model customary collaborative food security.

Hambatan hilirisasi di tingkat komunitas juga dipengaruhi oleh kesenjangan teknologi dan ekonomi. Meskipun secara klinis papeda dan keladi tumbuk teruji sebagai pangan fungsional yang kaya serat serta antioksidan,¹² adopsi teknologi di lapangan masih sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh metode pertanian tradisional, isolasi geografis, keterbatasan akses transportasi, dan rendahnya kapasitas petani lokal.¹³ Akibatnya, pengembangan ekonomi berbasis wirausaha sosial (sociopreneurship) terhambat, sehingga potensi ekonomi komoditas lokal belum mampu menyejahterakan masyarakat asli Papua.¹⁴

Melalui pendekatan yang komprehensif, riset ini berupaya mengintegrasikan celah konseptual, kebijakan, dan teknologi yang selama ini dikaji secara terpisah. Penyelesaian isu pangan di Papua membutuhkan sinergi tata kelola multipihak, inovasi pascapanen, dan pemberdayaan berbasis komunitas.¹⁵ Tinjauan literatur ini diarahkan untuk menganalisis dan mensintesis tata kelola pangan lokal di Papua guna menghasilkan rekomendasi strategi konseptual yang efektif demi mewujudkan kemandirian pangan yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain Systematic Literature Review (SLR) dengan mengadopsi panduan standar protokol PRISMA. Kerangka metodologis ini diterapkan demi menjamin objektivitas dan validitas proses penelusuran, penyaringan, serta sintesis literatur ilmiah terkait aktivitas pengelolaan komoditas pangan lokal di Papua, sehingga meminimalkan bias personal peneliti.

¹⁰ Nathan, "Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan: Sinergi kebijakan dan administrasi publik di Merauke"; E. Rikardus, "Penguatan kebijakan ketahanan pangan: Sinergi multi-pemangku kepentingan dalam peningkatan produksi padi," *Jurnal Kolaborasi Pemerintahan* 9, no. 4 (2025): 310–25.

¹¹ Nathan, "Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan: Sinergi kebijakan dan administrasi publik di Merauke"; Indahyani dan La Maga, "Alternatif kebijakan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua."

¹² Syadza Sefira A. dkk., "Pemanfaatan sagu dan keladi sebagai sumber pangan fungsional yang berkelanjutan di Provinsi Papua," *Jurnal Gizi dan Pangan Fungsional* 5, no. 3 (2024): 178–92.

¹³ K. F. Lermating dkk., "Ketersediaan dan aksesibilitas pangan lokal: Implikasinya terhadap ketahanan pangan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya," *Jurnal Sosio-Ekonomi Pertanian* 18, no. 2 (2024): 89–104; Indahyani dan La Maga, "Alternatif kebijakan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua."

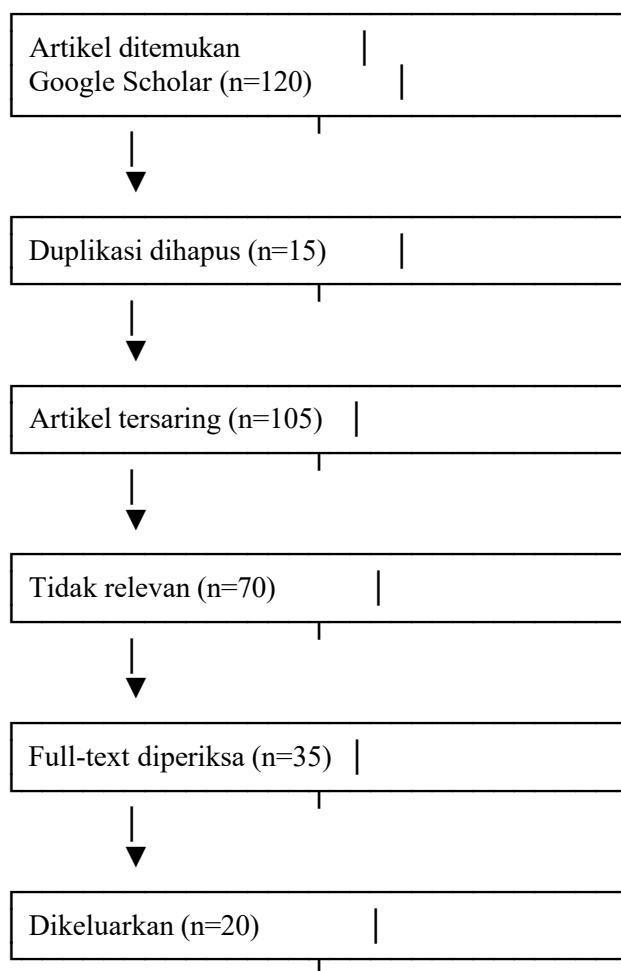
¹⁴ H. F. Sanaba dkk., "Penguatan kapasitas UMKM olahan pangan khas Papua berbasis sociopreneurship di Kampung Malagusa Papua Barat Daya," *Jurnal Inovasi Wirausaha Sosial* 4, no. 1 (2026): 55–70; La Oge, "Pengembangan teknologi pascapanen berbasis kearifan lokal dalam mendukung ketahanan pangan."

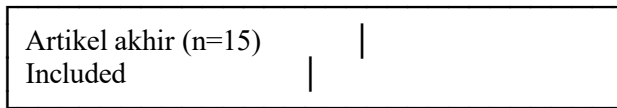
¹⁵ La Oge, "Pengembangan teknologi pascapanen berbasis kearifan lokal dalam mendukung ketahanan pangan"; R. Syarief dkk., "Pengembangan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan konflik Timika Papua," *Jurnal Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 140–55; Rikardus, "Penguatan kebijakan ketahanan pangan: Sinergi multi-pemangku kepentingan dalam peningkatan produksi padi."

Proses pengumpulan data sekunder dilakukan secara digital melalui basis data Google Scholar untuk menjaring artikel jurnal ilmiah yang relevan. Rentang publikasi dibatasi antara tahun 2009 hingga 2026 agar dinamika regulasi dan perkembangan teknologi pascapanen terbaru dapat terekam dengan baik. Strategi pencarian literatur diperkuat oleh formula kata kunci terstruktur dengan memanfaatkan operator Boolean, yaitu: "pangan lokal" AND "pengelolaan pangan" AND "ketahanan pangan" OR "kemandirian pangan" AND "Papua" OR "Papua Barat".

Data yang terjaring dari Google Scholar kemudian disaring secara bertahap melalui kriteria kelayakan. Artikel dikategorikan ke dalam kriteria inklusi apabila berupa artikel riset primer yang fokus membahas potensi gizi, pemanfaatan, teknologi pascapanen, atau kebijakan strategis daerah mengenai pangan lokal Papua. Sementara itu, kriteria eksklusi digunakan untuk mengeliminasi artikel yang tidak relevan dengan kata kunci atau berada di luar lokus wilayah Papua. Berdasarkan pemeriksaan dokumen secara menyeluruh (full-text eligibility), ditetapkan 15 artikel ilmiah yang memenuhi standar kualitas untuk dianalisis lebih lanjut.

Alur penyaringan literatur berdasarkan standar PRISMA tersebut digambarkan secara visual pada bagan di bawah ini:





Seluruh data dari 15 artikel terpilih kemudian dimasukkan ke dalam matriks ringkasan untuk mengklasifikasikan identitas penulis, tahun terbit, metode riset terdahulu, dan substansi temuan lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik (thematic analysis) dengan mengelompokkan ragam informasi ke dalam klaster-klaster konseptual. Pembagian klaster tersebut meliputi pola pemanfaatan hutan dan rawa oleh masyarakat subsisten, kandungan gizi sagu dan keladi, kendala institusional dan tantangan geografis, serta strategi hilirisasi melalui sociopreneurship dan tata kelola multipihak. Pada tahap akhir, hasil sintesis tema-tema ini dinarasikan secara deskriptif-analitis untuk memetakan celah penelitian (research gap) dan menyusun rekomendasi strategi ketahanan pangan berkelanjutan di Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

N0	Lokasi penelitian	Nama Penulis	Fokus kajian	Temuan utama
1.	Asmat, Papua	Rotua Siringoringo, Dr. Drs. Urip Wahyudin, M.Si, Eka Nurwahyuliningsih	Ketahanan sosial berbasis kearifan lokal masyarakat adat	Masyarakat Asmat bergantung pada hutan dan rawa sebagai sumber kehidupan. Ketahanan sosial dapat diperkuat melalui diversifikasi mata pencaharian dan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat adat.

N0	Lokasi penelitian	Nama Penulis	Fokus kajian	Temuan utama
2.	Indonesia (kajian umum)	La Oge	Teknologi pascapanen berbasis kearifan lokal	Teknologi pascapanen mampu mengurangi kehilangan hasil pertanian hingga meningkatkan kualitas dan ketahanan pangan.
3.	Merauke, Papua Selatan	Ivone Agustina Nathan	Strategi mewujudkan ketahanan pangan daerah	Ketahanan pangan belum optimal karena lemahnya koordinasi kelembagaan dan belum terintegrasinya sistem pangan adat dalam kebijakan pemerintah.
4.	Provinsi Papua	Rachmaeny Indahyani, La Maga	Pembangunan pertanian berkelanjutan	Kearifan lokal dan pertanian ramah lingkungan menjadi alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan.
5.	Papua	Viona Amelia*, Danang Prasetyo	Desa wisata dan ketahanan pangan	Pengembangan desa wisata berbasis masyarakat dapat mendukung pelestarian pangan lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

N0	Lokasi penelitian	Nama Penulis	Fokus kajian	Temuan utama
6.	Merauke, Papua Selatan	Willem Kabuam	Tata kelola ketahanan pangan	Kolaborasi pemerintah dan masyarakat adat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan sistem pangan lokal.
7.	Papua	Everistus Rikardus	Penguatan kebijakan ketahanan pangan	Sinergi antara pemerintah, petani, swasta, dan tokoh adat meningkatkan efektivitas kebijakan pangan.
8.	Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya	Krisna Fransina Lermating, Hendry Jems Yoel Aidore, Franklin D. Paiki	Ketersediaan dan aksesibilitas pangan lokal	Ketersediaan pangan dipengaruhi pola produksi tradisional, keterbatasan teknologi, dan kondisi geografis.
9.	Papua Barat	Triman Tapi, Mathius Tapi, Barba Nelfi Hebby Sopacua.	Kemandirian pangan saat pandemi Covid-19	Pemanfaatan pekarangan, diversifikasi pangan lokal, dan pengelolaan komoditas lokal meningkatkan kemandirian pangan masyarakat.

N0	Lokasi penelitian	Nama Penulis	Fokus kajian	Temuan utama
10.	Papua	Yohanes Ndiken ¹⁶ , Maria Kaize	Pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal	Program konversi lahan sagu menjadi sawah mendapat penolakan karena dianggap mengancam budaya dan ekosistem pangan lokal.
11	Papua Barat	Arif Faisol, Hostalige Hutasoit, Budiyo, Mashudi, Desi Natalia Edowai.	Potensi sagu sebagai pangan lokal	Sagu berpotensi menjadi sumber karbohidrat alternatif, tetapi produksinya masih rendah sehingga perlu pengembangan lebih lanjut.
12	Timika, Papua	Rizal Syarief, Sumardjo, Agit Kriswantriyono, Yulia Puspawati Wulandari	Pemberdayaan masyarakat untuk ketahanan pangan	Pelatihan pertanian, teknologi sederhana, dan kemitraan meningkatkan produksi pangan serta kesejahteraan masyarakat.
13.	Papua	A. Wahid Rauf dan Martina Sri Lestari	Pemanfaatan komoditas pangan lokal	Ubi jalar, talas, sagu, gembili, dan jawawut memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif.

¹⁶ Y. Ndiken dan M. Kaize, "Aktivitas pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal dalam menjaga resiliensi komunitas adat Papua," *Jurnal Antropologi Ekologis* 7, no. 2 (2024): 76–91.

N0	Lokasi penelitian	Nama Penulis	Fokus kajian	Temuan utama
14.	papua	Sefira, Syadza Andina, Dwi, Akhiriani Ramadani , Syahidah, Lathifah Hasna Qolby, dan Dedin, Finatsiyatull Rosida.	Pangan tradisional sebagai pangan fungsional	Papeda dan keladi memiliki nilai gizi tinggi dan berpotensi mendukung ketahanan pangan masyarakat.
15.	Kampung Malagusa, Papua	Hardiman Faramit Sanaba, Sabaria, Juminah, Budi Santoso, Darma, Intan Aulia Putri, Moh. Nasrul Ahmad, Fajar Kurniawan Lunggu.	Sociopreneurship pangan lokal	Penerapan teknologi, branding, dan pemasaran digital meningkatkan keterampilan masyarakat dan omzet usaha hingga 233%.

Dekonstruksi Paradigma dan Kesenjangan Konseptual

Ketahanan pangan yang berkelanjutan tidak boleh hanya diukur dari angka ketersediaan komoditas pada skala nasional. Indikator utamanya justru terletak pada aspek aksesibilitas, stabilitas, serta pemanfaatan pangan di tingkat akar rumput, khususnya pada kelompok masyarakat adat. Di Tanah Papua, modalitas ekologis yang melimpah mewujud dalam bentuk keanekaragaman hayati yang dikelola lewat pengetahuan lokal secara turun-temurun. Berdasarkan sintesis terhadap 15 artikel ilmiah, aktivitas pemenuhan kebutuhan pangan oleh penduduk asli Papua sangat bertumpu pada kearifan ekologis dalam memanfaatkan ekosistem hutan dan rawa. Komunitas lokal secara konsisten menggantungkan hidup pada pangan lokal seperti sagu, keladi, ubi jalar, talas, gembili, dan jawawut.

Sayangnya, benturan dengan arus modernisasi memicu pergeseran pola konsumsi. Muncul jurang pemisah (*gap*) yang bersifat konseptual, kebijakan, empiris, hingga teknologi. Secara konseptual, sistem pangan global cenderung mengabaikan kerentanan pola pertanian subsisten saat berhadapan dengan perubahan iklim. Padahal, sistem agroforestri organik yang diterapkan

masyarakat adat Papua jauh lebih adaptif dan ramah lingkungan ketimbang model pertanian intensif berbasis kimia modern. Walau agroforestri mampu menjaga stabilitas ekosistem dan menyediakan pangan multi-komoditas, praktik ini kerap dipandang sebelah mata dalam cetak biru

pembangunan nasional karena dinilai tidak produktif. Akibatnya, pemaksaan orientasi pada pertanian konvensional justru memicu degradasi lahan dan mengancam ketahanan pangan domestik.

Realitas Empiris: Paradoks Sagu dan Ketergantungan Impor

Kajian literatur menemukan sebuah anomali: kekayaan hayati Papua yang masif belum mampu mereduksi ketergantungan wilayah terhadap pasokan beras luar daerah. Sebagai contoh, potensi komoditas sagu (*Metroxylon sp*) belum dioptimalkan sebagai substitusi sumber karbohidrat utama. Melalui pendekatan kuantitatif berbasis Angka Kecukupan Energi (AKE) di Papua Barat, ditemukan bahwa dari ekspektasi konsumsi harian sebesar 295,77 gram per kapita, produksi sagu lokal hanya mampu menyumbang sekitar 0,27% hingga 0,30% bagi kebutuhan regional.

Minimnya angka kontribusi ini disebabkan oleh pola pemanenan yang masih bersifat ekstraktif langsung dari alam, tanpa adanya manajemen budidaya yang terstruktur. Oleh sebab itu, akselerasi kedaulatan pangan berbasis karbohidrat lokal memerlukan langkah konkret berupa perluasan lahan tanam, optimalisasi tata kelola hutan sagu rakyat, serta penggunaan varietas tanaman yang unggul.

Aspek Kebijakan dan Urgensi Tata Kelola Kolaboratif

Mandeknya pemanfaatan potensi pangan lokal diperparah oleh kebijakan tata kelola yang terfragmentasi. Di kawasan yang diplot sebagai sentra pangan seperti Kabupaten Merauke, regulasi sering kali tumpang tindih akibat lemahnya kapasitas birokrasi dan tidak sinkronnya arahan dari pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan yang lahir umumnya bersifat *top-down* dan terlalu memprioritaskan cetak sawah padi konvensional, tanpa mempertimbangkan aspek sosiokultural setempat.

Titik lemah dari regulasi saat ini adalah absennya pengakuan terhadap sistem pangan adat dalam instrumen hukum formal. Dampaknya, program ketahanan pangan dari pemerintah berjalan sendiri-sendiri tanpa melibatkan lembaga adat yang memegang otoritas kultural atas hak ulayat dan sumber daya alam.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan rekonstruksi tata kelola menuju model *collaborative governance*. Keberhasilan penataan pangan di wilayah terdepan sangat bergantung pada sinergi multidimensi antara birokrasi, komunitas tani, sektor swasta, akademisi, organisasi keagamaan, dan tokoh adat. Wadah koordinasi lintas sektor yang integratif sangat mendesak untuk dibentuk demi meredam konflik agraria. Dalam hal ini, pemerintah daerah wajib berperan sebagai fasilitator penyedia sarana produksi dan menerapkan desentralisasi yang adaptif, sementara komunitas lokal mengawal implementasi kebijakan lewat instrumen gotong royong di tingkat tapak.

Tekno-Ekonomi: Hambatan Pascapanen dan Solusi Intervensi

Dari segi kualitas, pangan otentik Papua seperti papeda atau keladi tumbuk memiliki keunggulan komparatif sebagai pangan fungsional karena kaya akan senyawa bioaktif, serat, dan antioksidan. Namun, hilirisasi produk ini terhambat oleh teknologi pascapanen yang masih konvensional. Kondisi topografi Papua yang menantang serta minimnya konektivitas transportasi menyebabkan isolasi wilayah yang memutus akses petani ke pasar modern. Akibatnya, angka kehilangan hasil (*post-harvest losses*) di tingkat lokal sangat tinggi, berkisar antara 20% hingga 30%.

Solusi atas persoalan teknologi ini adalah introduksi inovasi tepat guna yang murah, aplikatif, dan selaras dengan alam. Metode tradisional seperti fermentasi alami dan teknik pengeringan surya menggunakan bahan organik dapat dimodernisasi melalui sentuhan mekanisasi sederhana. Kombinasi ini terbukti efektif memperpanjang masa simpan produk tanpa merusak nutrisinya. Transformasi dari pola ladang berpindah menjadi pertanian menetap yang produktif dapat diakomodasi melalui penguatan kapasitas petani lewat teknologi pertanian presisi.

Tabel Analisis Kesenjangan dan Solusi Ketahanan Pangan Papua

Dimensi Kesenjangan	Realitas Lapangan / Hambatan	Solusi Integratif yang Ditawarkan
Konseptual	Sistem agroforestri adat dianggap tidak produktif; ada pemaksaan model pertanian intensif kimiawi.	Pengakuan agroforestri sebagai sistem pertanian ramah lingkungan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Empiris	Kontribusi produksi sagu baru memenuhi 0,27% - 0,30% dari target AKE (295,77 gram/kapita); ketergantungan beras tinggi.	Intensifikasi hutan sagu rakyat, perluasan areal, dan penggunaan varietas unggul.

Kebijakan	Regulasi bersifat <i>top-down</i> , berfokus pada padi, dan mengabaikan lembaga adat penguasa lahan.	Penerapan <i>collaborative governance</i> melalui pembentukan forum lintas sektor dan legalitas hukum sistem pangan adat.
Tekno-Ekonomi	Keterbatasan infrastruktur memicu <i>post-harvest losses</i> sebesar 20% - 30%; pemasaran terbatas.	Penerapan teknologi tepat guna (mekanisasi pascapanen), hilirisasi pangan fungsional, dan adopsi <i>digital marketing</i> .

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas dan Pariwisata

Pengembangan wirausaha sosial (*sociopreneurship*) terbukti mampu menggerakkan roda ekonomi mikro masyarakat Papua. Diversifikasi produk berbahan baku sagu atau garam nipah yang dikelola oleh UMKM lokal memberikan dampak ekonomi yang nyata. Melalui pendampingan yang konsisten dari perguruan tinggi dan pemerintah, masyarakat dapat menguasai teknik pengemasan (*packaging*), pemajangan merek (*branding*), hingga pemasaran digital. Intervensi wirausaha sosial ini tercatat berhasil menaikkan pemahaman teknis pengolahan pangan lokal dari 48,24% menjadi 85%, yang diikuti dengan pertumbuhan omzet usaha hingga 233%.

Di samping itu, pemanfaatan pekarangan rumah menjadi langkah taktis dalam memperkuat resiliensi pangan keluarga menghadapi guncangan ekonomi global. Strategi ini juga dapat dikawinkan dengan sektor pariwisata melalui konsep desa wisata berbasis komunitas. Melalui skema ini, kuliner tradisional Papua dapat diperkenalkan langsung kepada wisatawan secara lebih luas, yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan alternatif bagi penduduk asli tetapi juga berfungsi sebagai benteng pertahanan budaya pangan lokal dari dominasi pangan instan produk luar.

Dilema ketahanan pangan di Tanah Papua mencerminkan adanya benturan paradigma antara modernisasi pertanian berskala besar dan eksistensi sistem pangan lokal yang berbasis kearifan adat. Hasil analisis tematik menunjukkan bahwa kegagalan mewujudkan kemandirian pangan di wilayah ini berakar dari *policy gap* yang mengabaikan karakteristik sosial-ekologis setempat. Kebijakan "padiisasi" yang dipaksakan di beberapa wilayah strategis seperti Merauke terbukti memicu marginalisasi struktural

terhadap komoditas asli seperti sagu dan umbi-umbian.¹⁷ Akibatnya, terjadi standardisasi pangan nasional yang bersifat *top-down*, yang tidak hanya mengikis kedaulatan pangan Suku Asmat dan komunitas adat lainnya, tetapi juga memicu ketergantungan karbohidrat regional yang sangat tinggi pada beras impor.¹⁸

Di sisi lain, *technological gap* memperparah kerentanan ini melalui tingginya angka *post-harvest losses* yang mencapai 20–30% dari total produksi akibat minimnya infrastruktur dan metode pengelolaan yang masih sangat tradisional.¹⁹ Padahal, secara laboratorium, produk turunan pangan lokal seperti papeda dan keladi tumbuk memiliki potensi ekonomi yang masif sebagai pangan fungsional kaya serat dan antioksidan.²⁰ Kendala geografis yang ekstrem dan keterbatasan kapasitas SDM petani lokal menjadi pembatas utama yang menghambat hilirisasi komoditas ini ke sektor komersial.²¹

Guna menjembatani fragmentasi tersebut, model *customary collaborative food security* hadir sebagai resolusi konseptual yang integratif. Model ini menawarkan kebaruan dengan mendudukkan kelembagaan adat sebagai mitra sejajar dalam administrasi publik pemerintah daerah.²² Melalui pilar hilirisasi pascapanen berbasis wirausaha sosial (*sociopreneurship*), teknologi tepat guna dapat diintroduksi tanpa mencederai nilai sosiokultural masyarakat.²³ Pada akhirnya, pemulihan hak kelola atas hutan ulayat menjadi kunci mutakhir untuk mentransformasi sistem pertanian subsisten yang rentan menjadi ekosistem pangan yang mandiri, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan.²⁴ Ketahanan pangan Papua tidak akan tercapai melalui simplifikasi homogenisasi beras, melainkan lewat pengakuan hukum atas diversitas pangan lokal yang dikelola secara kolaboratif.²⁵ Oleh karena itu,

¹⁷ Nathan, “Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan: Sinergi kebijakan dan administrasi publik di Merauke”; Rikardus, “Penguatan kebijakan ketahanan pangan: Sinergi multi-pemangku kepentingan dalam peningkatan produksi padi.”

¹⁸ Faisol dkk., “Analisis potensi tanaman sagu (*Metroxylon* sp) sebagai bahan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat”; Indahyani dan La Maga, “Alternatif kebijakan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua.”

¹⁹ Siringoringo dkk., “Tantangan dan strategi penguatan ketahanan sosial berbasis kearifan lokal pada komunitas adat terpencil Suku Asmat”; La Oge, “Pengembangan teknologi pascapanen berbasis kearifan lokal dalam mendukung ketahanan pangan.”

²⁰ Sefira dkk., “Pemanfaatan sagu dan keladi sebagai sumber pangan fungsional yang berkelanjutan di Provinsi Papua.”

²¹ Lermating dkk., “Ketersediaan dan aksesibilitas pangan lokal: Implikasinya terhadap ketahanan pangan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya”; Sanaba dkk., “Penguatan kapasitas UMKM olahan pangan khas Papua berbasis *sociopreneurship* di Kampung Malagusa Papua Barat Daya.”

²² Nathan, “Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan: Sinergi kebijakan dan administrasi publik di Merauke”; Kabuam, “Tata kelola ketahanan pangan daerah perbatasan: Sinergi pemerintah dan komunitas lokal di Merauke.”

²³ Sanaba dkk., “Penguatan kapasitas UMKM olahan pangan khas Papua berbasis *sociopreneurship* di Kampung Malagusa Papua Barat Daya”; La Oge, “Pengembangan teknologi pascapanen berbasis kearifan lokal dalam mendukung ketahanan pangan.”

²⁴ Siringoringo dkk., “Tantangan dan strategi penguatan ketahanan sosial berbasis kearifan lokal pada komunitas adat terpencil Suku Asmat”; Tapi dkk., “Langkah antisipatif membangun kemandirian pangan lokal masyarakat di Papua Barat selama masa pandemi Covid-19.”

²⁵ Amelia dan Prasetyo, “Pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat sebagai penguatan ketahanan pangan”; Syarief dkk., “Pengembangan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan konflik Timika Papua.”

keberhasilan model integratif ini sangat bergantung pada komitmen politik pemerintah daerah untuk menghentikan subordinasi pangan lokal dan mulai mengarusutamakan hak-hak adat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.²⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil *Systematic Literature Review* terhadap 15 artikel ilmiah, dapat disimpulkan bahwa ketahanan pangan di Papua memiliki potensi yang sangat besar melalui keberadaan sumber daya pangan lokal seperti sagu, keladi, ubi jalar, talas, gembili, dan jawawut yang telah lama menjadi bagian dari sistem pengetahuan masyarakat adat. Namun, potensi tersebut belum mampu diwujudkan secara optimal akibat adanya kesenjangan multidimensi, meliputi dominasi paradigma pangan berbasis beras, lemahnya integrasi kelembagaan adat dalam kebijakan publik, keterbatasan teknologi pascapanen, serta rendahnya akses terhadap pasar dan inovasi ekonomi.

Penelitian ini menegaskan bahwa pencapaian kemandirian pangan Papua memerlukan transformasi tata kelola dari pendekatan konvensional yang bersifat *top-down* menuju model *customary collaborative food security* yang menempatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan pangan. Integrasi antara kearifan lokal, kebijakan pemerintah yang adaptif, teknologi tepat guna, dan penguatan *sociopreneurship* menjadi fondasi penting untuk menciptakan sistem pangan yang resilien terhadap perubahan iklim dan tekanan global. Dengan demikian, keberhasilan ketahanan pangan Papua tidak ditentukan oleh homogenisasi pola konsumsi nasional, melainkan oleh kemampuan dalam mengakui, melindungi, dan mengembangkan diversitas pangan lokal sebagai aset strategis pembangunan berkelanjutan.

Implikasi Penelitian

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pengembangan perspektif integratif mengenai ketahanan pangan Papua yang selama ini lebih banyak dikaji secara parsial, baik dari aspek sosial budaya, produksi pangan, maupun kebijakan pemerintah. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang cenderung menempatkan pangan lokal sebagai komoditas alternatif, penelitian ini memperkenalkan konsep *customary collaborative food security* sebagai pendekatan tata kelola yang menggabungkan sistem pengetahuan adat, administrasi publik, inovasi teknologi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui sintesis literatur berbasis PRISMA, penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat dimensi utama kesenjangan ketahanan pangan Papua, yaitu kesenjangan konseptual, empiris, kebijakan, dan teknologi, sekaligus menawarkan kerangka solusi yang menempatkan masyarakat adat sebagai aktor

²⁶ Kabuam, "Tata kelola ketahanan pangan daerah perbatasan: Sinergi pemerintah dan komunitas lokal di Merauke"; Rikardus, "Penguatan kebijakan ketahanan pangan: Sinergi multi-pemangku kepentingan dalam peningkatan produksi padi."

utama dalam pembangunan pangan berkelanjutan.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat sebagai dasar perumusan kebijakan pangan daerah yang lebih kontekstual dengan karakteristik sosial-ekologis Papua. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan ketahanan pangan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan peningkatan produksi beras, tetapi perlu diarahkan pada diversifikasi pangan lokal, penguatan hak kelola masyarakat adat, pengembangan teknologi pascapanen tepat guna, serta peningkatan kapasitas ekonomi melalui *sociopreneurship*. Strategi tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam membangun sistem pangan yang tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologi, ketahanan budaya, dan kesejahteraan masyarakat asli Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, V., dan D. Prasetyo. "Pengelolaan desa wisata berbasis masyarakat sebagai penguatan ketahanan pangan." *Jurnal Tata Kelola Perdesaan* 4, no. 2 (2022): 112–25.
- Faisol, A., H. Hutasoit, Budiyo, Mashudi, dan D. N. Edowai. "Analisis potensi tanaman sagu (*Metroxylon* sp) sebagai bahan pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan di Provinsi Papua Barat." *Jurnal Agribisnis Kepulauan* 13, no. 1 (2025): 45–58.
- Indahyani, R. dan La Maga. "Alternatif kebijakan dalam pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi Papua." *Jurnal Pembangunan Hijau* 8, no. 3 (2023): 201–15.
- Kabuam, W. "Tata kelola ketahanan pangan daerah perbatasan: Sinergi pemerintah dan komunitas lokal di Merauke." *Jurnal Administrasi Publik Regional* 11, no. 1 (2026): 14–29.
- La Oge. "Pengembangan teknologi pascapanen berbasis kearifan lokal dalam mendukung ketahanan pangan." *Jurnal Ketahanan Pangan Indonesia* 6, no. 1 (2022): 33–47.
- Lermating, K. F., H. J. Y. Aidore, dan F. D. Paiki. "Ketersediaan dan aksesibilitas pangan lokal: Implikasinya terhadap ketahanan pangan di Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya." *Jurnal Sosio-Ekonomi Pertanian* 18, no. 2 (2024): 89–104.
- Nathan, I. A. "Strategi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan: Sinergi kebijakan dan administrasi publik di Merauke." *Jurnal Kebijakan Publik Pemerintahan* 10, no. 2 (2025): 145–60.
- Ndiken, Y., dan M. Kaize. "Aktivitas pemberdayaan masyarakat berbasis pangan lokal dalam menjaga resiliensi komunitas adat Papua." *Jurnal Antropologi Ekologis* 7, no. 2 (2024): 76–91.
- Rauf, A. W., dan M. S. Lestari. "Pemanfaatan komoditas pangan lokal sebagai sumber pangan alternatif di Papua." *Jurnal Litbang Pertanian* 28, no. 3 (2009): 97–103.
- Rikardus, E. "Penguatan kebijakan ketahanan pangan: Sinergi multi-pemangku kepentingan dalam peningkatan produksi padi." *Jurnal Kolaborasi Pemerintahan* 9, no. 4 (2025): 310–25.
- Sanaba, H. F., Sabaria, Juminah, dkk. "Penguatan kapasitas UMKM olahan pangan khas Papua berbasis sociopreneurship di Kampung Malagusa Papua Barat Daya." *Jurnal Inovasi Wirausaha Sosial* 4, no. 1 (2026): 55–70.
- Sefira, Syadza, A., A. R. Dwi, L. H. Q. Syahidah, dan F. R. Dedin. "Pemanfaatan sagu dan keladi sebagai sumber pangan fungsional yang berkelanjutan di Provinsi Papua." *Jurnal Gizi dan Pangan Fungsional* 5, no. 3 (2024): 178–92.
- Siringoringo, R., U. Wahyudin, dan E. Nurwahyuliningsih. "Tantangan dan strategi penguatan ketahanan sosial berbasis kearifan lokal pada komunitas adat terpencil Suku Asmat." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Adat* 12, no. 1 (2023): 22–38.
- Syarief, R., Sumardjo, A. Kriswantriyono, dan Y. P. Wulandari. "Pengembangan ketahanan pangan melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan rawan konflik Timika Papua." *Jurnal Penyuluhan dan Pengembangan Masyarakat* 13, no. 2 (2017): 140–55.
- Tapi, T., M. Tapi, dan B. N. H. Sopacua. "Langkah antisipatif membangun kemandirian pangan lokal masyarakat di Papua Barat selama masa pandemi Covid-19." *Jurnal Resiliensi Ekonomi Daerah* 6, no. 2 (2023): 80–95.